



**KECAMATAN
BANDAR LAKSAMANA**

**RENCANA
2020**

**RENCANA KERJA
KEC.BANDAR LAKSAMANA
TAHUN 2020**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh berkat rahmat, taufik dan hidayatnya sehingga Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Bandar Laksamana Tahun 2020 dapat terselesaikan.

Dokumen Renja ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembagnunan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari kekurangan, oleh karna itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan dimasa yang akan datang.

Tenggayun, Februari 2019
CAMAT BANDAR LAKSAMANA



AFRIZAL, M.Si
PEMBINA
NIP. 19650101 198410 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan dan merupakan penjabaran kerja tahunan dari setiap Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD).

Renja SKPD disusun sebagai dokumen yang akan dibahas pada Forum SKPD yang nantinya merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setelah dilakukannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Dearah. Maka keberadaan Undang-undang tersebut sebagai salah satu produk hukum menjadi alat penting dan strategis dalam merespon berbagai tuntutan perubahan kearah pelaksanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel.

Mengacu kepada ketentuan perundang-undangan dimaksud, telah membawa perubahan mendasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah, hal ini ditandai dengan adanya perubahan manajemen dalam pelaksanaan pembangunan daerah, yaitu pelaksanaan yang sentralistik kearah pelaksanaan yang desentralistis, demokratis dan otonom. Masyarakat sangat mengharapkan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis dapat mengembangkan kebijakan yang efektif dan efisien dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan intensitas pembangunan yang berkelanjutan dan bangkitnya pembangunan Kecamatan Bandar Laksamana yang berwawasan masa depan.

Dalam rangka pelaksanaan peraturan – peraturan tersebut, serta untuk mendorong instansi pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*), serta lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas maupun fungsinya, maka berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016, dibentuklah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Camat Bukit Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam mengimplementasikan kinerjanya yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas Kinerja, maka disini dapat disajikan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – SKPD) Kantor Camat Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis.

Penyusunan Renja SKPD mesti memperhatikan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021, Renstra SKPD dan Renja Kementerian atau Lembaga Negara terkait serta Renja SKPD Provinsi dan RPJMD Provinsi, yang seluruhnya akan digunakan sebagai bahan di dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.

Dalam hal pembangunan daerah, Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan unsur penyelenggara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Selaras dengan ketentuan tersebut, sistem pembangunan yang demikian diharapkan akan dapat menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Kecamatan Bandar Laksamana dengan mengoptimalkan partisipasi dan peran serta masyarakat sehingga terwujudnya pembangunan di Kecamatan Bandar Laksamana khususnya dan Kabupaten Bengkalis umumnya secara berkeadilan, efisien, efektif dan berkelanjutan.

1.2 Landasan hukum

Sistem pemerintahan negara berdasarkan UUD 1945 telah memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan Otonomi Daerah yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dengan memperhatikan potensi dan keuangan daerah. Hal ini dikuatkan dengan berbagai macam peraturan perundang – undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah(RENJA-SKPD) Kantor Camat Bandar Laksamana diantaranya :

1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) ;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan wewenang serta kedudukan kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015– 2019;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalin dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 23. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau tahun 2010 Nomor 10);

24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2004 Nomor 22);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2007 Nomor 03);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2008 Nomor 07);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 08);
29. Peraturan Daerah Kabupten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
32. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentan Kedudukan, Susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada kecamatan dan kelurahan dilingkungan Kabupaten Bengkalis;

1.3 Maksud dan tujuan

1.3.1 Maksud

Adapun maksud dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kantor Camat Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis, adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan suatu acuan resmi bagi seluruh aparatur Kantor Camat Bandar Laksamana dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.
- b. Menyediakan suatu tolok ukur atau standarisasi pencapaian kinerja Kantor Camat Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan serta memperbaiki kinerja dimasa mendatang setiap SKPD.
- c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Kantor Camat Bandar Laksamana sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bengkalis.
- d. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Camat Bandar Laksamana dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
- e. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Camat Bandar Laksamana untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
- f. Memberikan motivasi dan kreasi masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih intens lagi dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Bandar Laksamana adalah :

- a. Tersusunnya perencanaan untuk memberikan arah pada penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Bandar Laksamana.
- b. Tersusunnya perencanaan sebagai dasar utama bagi setiap bagian dalam menyusun program kegiatan kedepan sesuai dengan potensi yang ada dan kemampuan dana yang tersedia.
- c. Tersusunnya perencanaan Kecamatan Bandar Laksamana yang komprehensif, tranparansi, akuntabel dan partisipatif.

1.4 Sistematika penulisan

Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Bandar Laksamana Tahun Anggaran 2020 sebagai pedoman dan arah kerja Pemerintah Kecamatan Bandar Laksamana, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 dengan Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.6.090.088.800.00 Dan Belanja Tidak Langsung sebesar 2.943.577.199.00-,

Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 yang lalu, secara rata- rata seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan blum dapat memenuhi target yang telah di rencanakan, dikarnakan dana untuk ganti rugi tanah gedung kantor belum dapat direalisasikan. realisasi rata- rata renja SKPD tahun anggaran 2018 untuk realisasi keuangan sebesar 48,1 % dan realisasi fisik 95,84 %. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kantor Camat Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Prangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 Kec. Bandar Laksamana

Kode	Ususan/Bidang Ususan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2021)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6*100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4*100
Unusan Kewilayahan										
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
01 01 01		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi kantor								
01 09 01 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat menyurat dan administrasi perkantoran terlaksana dengan baik	2150	85	500	500	100	585	1.170	54,42
01 09 01 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya listrik, air dan layanan internet	400	100	100	100	100	117	317	79,36
01 09 01 006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak dioperasikan	8	0	2	2	100	2	4	50,00
01 09 01 008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tenwujudnya kantor dan lingkungan yang bersih dan nyaman	1226	75	294	294	100	369	738	60,20
01 09 01 010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dalam membent pelayanan	4622	57	1143	1143	100	1200	2400	51,93
01 09 01 011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1839	115	431	431	27	546	776	42,20
01 09 01 012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen listrik dan/ penerangan bangunan kantor tersedia dengan baik dan cukup	532	1	133	113	84,96	1	115	21,62
01 09 01 015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan ASN	49	9	10	10	100	19	38	77,55
01 09 01 017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya dukungan terhadap aparatur	14400	1200	3300	3300	100,00	4500	9000	62,50
01 09 01 018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah dan dalam Daerah	Tertaksananya konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas	413	57	89	89	100	146	292	70,70

1		2		3		4	5	6	7	8 = 7 ⁶ *100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4*100
12	01	09	30	134	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bandar Laksamana	Meningkatkan capaian kinerja Program PKK kecamatan dan desa Tim	28	0	7	100	7	14	50,00
13	01	09	30	135	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi tingkat Kecamatan	MTQ tingkat kecamatan dapat terlaksana dengan baik Cabang lomba	20	0	5	100	5	10	50,00

Pada tahun anggaran 2020 Kantor Camat Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis akan melaksanakan beberapa rencana program dan kegiatan Kantor Camat Bandar Laksamana tahun anggaran 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.2
Rencana Program dan Kegiatan Kantor Camat Bandar Laksamana Tahun Anggaran 2020

Kode Rekening	Program/Kegiatan	PPA (Rp.)
(1)	(2)	(4)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.575.306.199,00
	- Gaji dan Tunjangan	1.798.231.389,00
	-Tambahan Penghasilan PNS	1.777.074.810,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.652.471.199,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	13.216.421.750,00
URUSAN	URUSAN WAJIB : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah,	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	PPA (Rp.)
(1)	(2)	(4)
	Kepegawaian dan Persandian	
5.00.5.00.01.02.01	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.259.640.250,00
5.00.5.00.01.09.01.001	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	261.450.000,00
5.00.5.00.01.09.01.002	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.000.000,00
5.00.5.00.01.09.01.006	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	8.000.000,00
5.00.5.00.01.09.01.008	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	201.458.000,00
5.00.5.00.01.09.01.010	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	41.169.450,00
5.00.5.00.01.09.01.011	6 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	12.763.800,00
5.00.5.00.01.09.01.012	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	15.074.000,00
5.00.5.00.01.09.01.015	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.000.000,00
5.00.5.00.01.09.01.017	9 Penyediaan Makanan dan Minuman	47.500.000,00
5.00.5.00.01.09.01.018	10 Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan dalam Daerah	350.000.000,00
5.00.5.00.01.09.01.019	11 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	153.600.000,00
5.00.5.00.01.09.01.033	12 Penyediaan Jasa Sopir Kantor	19.200.000,00
5.00.5.00.01.09.01.034	13 Publikasi Informasi Pembangunan	47.425.000,00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	PPA (Rp.)
(1)	(2)	(4)
5.00.5.00.01.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10.181.050.000,00
5.00.5.00.01.09.02.003	1. Pembangunan Gedung Kantor	5.000.000.000,00
5.00.5.00.01.09.02.056	2. Pembangunan Fasilitas gedung kantor	1.050.000.000,00
5.00.5.00.01.09.02.002	3. Pembangunan Rumah Dinas	3.800.000.000,00
5.00.5.00.01.09.02.007	4. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	35.150.000,00
5.00.5.00.01.09.02.009	5. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	25.150.000,00
5.00.5.00.01.09.02.010	6. Pengadaan Mebeluer	9.500.000,00
5.00.5.00.01.09.02.005	7. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	70.000.000,00
5.00.5.00.01.09.02.024	8. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	52.800.000,00
5.00.5.00.01.09.02.028	9. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	11.700.000,00
5.00.5.00.01.09.02.047	10. Penyediaan rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat	66.000.000,00
5.00.5.00.01.09.02.208	11. Pembinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet	39.750.000,00
5.00.5.00.01.09.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	74.400.000,00
5.00.5.00.01.09.05.110	1 Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat	70.000.000,00
5.00.5.00.01.09.05.157	2 Peningkatan Kesegaran Jasmani	4.400.000,00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	PPA (Rp.)
(1)	(2)	(4)
5.00.5.00.01.09.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	68.900.000,00
5.00.5.00.09.02.06.30	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Perangkat Daerah	68.900.000,00
5.00.01.5.00.01.09.30	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan	1.632.431.000,00
5.00.01.5.00.01.09.30.004	1 Penyelenggaraan Operasi Pekat	7.350.000,00
5.00.01.5.00.01.09.30.005	2 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	23.175.000,00
5.00.01.5.00.01.09.30.010	3 Pengiriman Peserta MTQ	263.300.000,00
5.00.01.5.00.01.09.30.014	4 Evaluasi Kinerja Desa	22.865.000,00
5.00.01.5.00.01.09.30.022	5 Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	17.250.000,00
5.00.01.5.00.01.09.30.050	6 Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan APBDesa	14.883.000,00
5.00.01.5.00.01.09.30.090	7 Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	196.101.000,00
5.00.01.5.00.01.09.30.104	8 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	122.779.500,00
5.00.01.5.00.01.09.30.123	9 Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	290.943.000,00
5.00.01.5.00.01.09.30.124	10 Peringatan penyelenggaraan Hari Besar dan Keagamaan	38.150.000,00
5.00.01.5.00.01.09.30.134	11 Penguatan kelembagaan PKK Kecamatan Bandar Laksamana	200.000.000,00
5.00.01.5.00.01.09.30.135	12 Peningkatan Kualitas seni baca Al-Qur'an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	381.730.000,00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	PPA (Rp.)
(1)	(2)	(4)
5.00.01.5.00.01.09.30.149	13 Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIPCAM	53.900.000,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

SKPD Kantor Camat Bandar Laksamana merupakan SKPD yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Artinya bahwa tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah peningkatan pelayanan Kecamatan terhadap masyarakat Kecamatan Bandar Laksamana, baik yang terkait dengan pelayanan perijinan, administrasi persuratan dan lain-lain. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Bandar Laksamana menyelenggarakan 1 Urusan yaitu Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut :

1. Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program SKPD

Pada tahun 2018, Kecamatan Bandar Laksamana telah menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 1 dokumen, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 1 dokumen, Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) 1 dokumen, Rencana Kerja (RENJA) 1 dokumen, laporan evaluasi Renja semesteran sebanyak 4 dokumen, laporan realisasi fisik dan keuangan bulanan, laporan keuangan, profil kecamatan sejumlah 1 dokumen.

Tugas Pokok Kantor Camat Bandar Laksamana adalah :

1. Melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.
2. Menyelenggaraan tugas Umum Pemerintah meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

3. Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang belum dapat dilaksanakan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- Perizinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan; dan Kewenangan lain yang di limpahkan.

Semua Pegawai Kantor Camat Bandar Laksamana diharapkan mengerti tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Bandar Laksamana, sesuai Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 06 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas pada Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kedisiplinan pegawai Kantor Camat Bandar Laksamana Tahun 2018, tingkat kehadiran pegawai Kantor Camat Bandar Laksamana sangat baik yakni sebesar 97%. Kondisi ini merupakan implikasi dari penerapan kebijakan *Reward and Punishment* di Kantor Camat Bandar Laksamana, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.2.1 *Reward* (Penghargaan)

Selaku SKPD yang menjalankan tugas dan fungsi Pelayanan memiliki beban kerja dan tanggung jawab yang besar kepada masyarakat. Sebagai penghargaan bagi pegawai negeri/staf lingkup Kantor Camat Bandar Laksamana, selain diberikan tambahan penghasilan (insentif) sesuai ketetapan pemerintah juga diberikan tunjangan kinerja aparatur perencana berdasarkan kondisi kerja sesuai dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 184/KPTS/IV/2011.

2.2.2 *Punishment* (Sanksi)

Selain bentuk penghargaan di atas, Kantor Camat Bandar Laksamana juga menetapkan *punishment* (sanksi) bagi seluruh pegawai yang tidak disiplin berupa pemotongan insentif serta teguran oleh atasan baik secara lisan maupun tulisan. Disamping sanksi tersebut di atas, bagi pegawai yang kurang disiplin juga mendapatkan sanksi normatif dari pimpinan berupa pengurangan keterlibatan dalam beberapa aktifitas dan kegiatan Kantor Camat Bandar Laksamana, namun tetap dilakukan pendekatan persuasif kepada yang bersangkutan sebagai bentuk pembinaan secara langsung.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Dalam rangka mewujudkan tujuannya, SKPD Kecamatan Bandar Laksamana telah melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD. Beberapa program kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Mencermati perkembangan kontemporer dalam masyarakat Kecamatan Bandar Laksamana , dapat dipetakan isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan *stakeholder* terkait untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan rencana strategis sehingga diperoleh output yang lebih aspiratif,
2. Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir yang dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu sebagai modal *database* dalam menyusun perencanaan pembangunan. Untuk mencapai hal ini maka dibutuhkan personil yang dinamis dalam melakukan *collecting data*, rekapitulasi data dan penyusunan *database*.
3. Pemerataan pembangunan fisik sekaligus membuka lapangan pekerjaan dengan memberdayakan warga lokal.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Kantor Camat Bandar Laksamana telah sejalan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Bengkalis, adapun perubahan yang terjadi hanya pada besaran pagu anggaran dari masing-masing program dan kegiatan. Adapun terjadinya perbedaan pagu anggaran tersebut terjadi disebabkan oleh perubahan standarisasi dari harga barang dan jasa serta honorarium kegiatan sehingga perlu dilakukan perubahan dari item masing-masing kegiatan yang telah direncanakan. Dalam penyusunan rencana kerja OPD Tahun 2020 proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan SKPD dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, dalam hal ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan

perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun SKPD lainnya.

Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Kecamatan Bandar Laksamana sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya. Rancangan rencana kerja Kecamatan Bandar Laksamana didiskusikan dalam pembahasan Forum SKPD tingkat Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan dan sasaran Renja Kantor Camat yaitu :

Tujuan :

1. Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan organisasi Kecamatan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kenyamanan dan percepatan proses pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat se Kecamatan Bandar Laksamana baik masalah kependudukan, pertanahan, pembinaan Kelurahan, Pembinaan lembaga kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPM).

Sasaran :

1. Tercapainya kualitas sumber daya manusia dalam bidang kependudukan, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dapat memiliki kemampuan melakukan koordinasi pelaksana kebijakan kepala daerah, memiliki kemampuan inovatif, pendekesian dini dan antisipatif , memiliki kemampuan untuk memandu dan mendorong kearah solusi dan kebijakan yang baik.
2. Tercapainya konsistensi pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, efektif, transparan dan akuntabel.

2.2 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada Renja Kantor Camat Bandar Laksamana tertuang di dalam lampiran renja ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Kantor Camat Bandar Laksamana tahun anggaran 2020 ini disampaikan kepada Bupati Bengkalis sebagai wujud pertanggung jawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis dan sebagai bahan masukan guna menetapkan kebijakan pada masa yang akan datang.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) ini dibuat dalam rangka memenuhi amanat peraturan yang berlaku, renja SKPD ini juga harus didukung penganggaran dari Pemerintah daerah dan diharapkan sesuai dengan usulan program dan kegiatan yang diusulkan. Jika usulan ini disesuaikan atau dirasionalkan supaya tidak mengubah hal- hal yang substansi dari yang

diusulkan. Jika terdapat perbedaan persepsi antara SKPD dengan TAPD diharapkan komunikasi yang intens sebagai jalan penyelesaian.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja Kinerja Kantor Camat Bandar Laksamana Tahun 2020 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaannya dimasa yang akan datang.

Apa yang diusulkan diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan- aturan yang ditetapkan. Kiranya Renja Kantor Camat Bandar Laksamana Tahun Anggaran 2020 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan memberikan informasi secara transparan kepada stakeholder sehingga dapat memberikan umpan balik dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kantor Camat Bandar Laksamana.

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN BENGKALIS**

KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG								
1 1 01	Gaji dan Tunjangan			1.798.231.389,00					1.978.054.527,90
1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS			1.777.074.810,00					1.954.782.291,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG			3.575.306.199,00					3.932.836.818,90
B	BELANJA LANGSUNG			13.216.421.750,00					14.444.823.315,00
01 09 01	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran								1.385.604.275,00
	Kegiatan :								
01 09 01 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Jumlah surat/dokumen keluar dan masuk yang dilayani. 2. Jumlah jasa tenaga administrasi. 3. Jumlah tenaga administrasi	Kec. Bandar Laksamana	850 Surat, 17 Orang, 1 Orang	261.450.000,00	APBD		850 Surat, 17 Orang, 1 Orang	287.595.000,00
01 09 01 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan listrik, air dan internet	Kec. Bandar Laksamana	100%	89.000.000,00	APBD		100%	97.900.000,00
01 09 01 005	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat) yang diruliskan izimnya	Kec. Bandar Laksamana	3 unit	8.000.000,00	APBD		3 unit	8.800.000,00
01 09 01 006	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1. Jumlah alat kebersihan yang dibutuhkan. 2. Jumlah tenaga kebersihan	Kec. Bandar Laksamana	25 item, 4 orang	201.458.000,00	APBD		25 item, 4 orang	221.603.800,00
01 09 01 010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diperlukan	Kec. Bandar Laksamana	44 item	41.169.450,00	APBD		44 item	45.286.395,00
01 09 01 011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Jumlah barang cetakan yang diperlukan. 2. Jumlah penggandaan yang diperlukan	Kec. Bandar Laksamana	7 item, 12.000 lembar	12.763.800,00	APBD		7 item, 12.000 lembar	14.040.180,00
01 09 01 012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang diperlukan	Kec. Bandar Laksamana	15 item	15.074.000,00	APBD		15 item	16.581.400,00
01 09 01 015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah berlangganan surat kabar dan tabloid	Kec. Bandar Laksamana	15 media	13.000.000,00	APBD		15 media	14.300.000,00
01 09 01 017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia	Kec. Bandar Laksamana	2500 kotak	47.500.000,00	APBD		2500 kotak	52.250.000,00
01 09 01 018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah konsultansi/koordinasi dalam dan luar daerah	Kec. Bandar Laksamana	124 kali	350.000.000,00	APBD		124 kali	385.000.000,00
01 09 01 019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah jasa tenaga keamanan kantor	Kec. Bandar Laksamana	4 Orang	153.600.000,00	APBD		4 Orang	168.960.000,00
01 09 01 033	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Jumlah tenaga supir yang tersedia	Kec. Bandar Laksamana	1 Orang	19.200.000,00	APBD		1 Orang	21.120.000,00

-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
01 09 01 034	Publikasi Informasi Pembangunan	pemenuhan kegiatan publikasi informasi	Kec. Bandar Laksamana	1 tahun	47.425.000,00	APBD		1 tahun	52.167.500,00
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
01 09 02	Kegiatan :				10.181.060.000,00				11.199.166.000,00
01 09 02 003	Pembangunan gedung Kantor	jumlah gedung kantor camat dan gedung pertemuan yang dibangun	Kec. Bandar Laksamana	2 unit	5.000.000.000,00	APBD		2 unit	5.500.000.000,00
01 09 02 056	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	jumlah gedung pertemuan yang dibangun	Kec. Bandar Laksamana	1 Unit	1.050.000.000,00	APBD		1 Unit	1.155.000.000,00
01 09 02 002	Pembangunan Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dibangun	Kec. Bandar Laksamana	2 Unit	3.800.000.000,00	APBD		2 Unit	4.180.000.000,00
01 09 02 005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan	Kec. Bandar Laksamana	2 Unit	70.000.000,00	APBD		2 Unit	77.000.000,00
01 09 02 007	Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	Kec. Bandar Laksamana	15 item	35.150.000,00	APBD		15 item	38.665.000,00
01 09 02 009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	Kec. Bandar Laksamana	7 unit	25.150.000,00	APBD		7 unit	27.665.000,00
01 09 02 010	Pengadaan Meubeler	Jumlah meubelair yang diperlukan	#REF!	5 item%	9.500.000,00	APBD		5 item%	10.450.000,00
01 09 02 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kec. Bandar Laksamana	2 Unit	52.800.000,00	APBD		2 Unit	58.080.000,00
01 09 02 028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1. Jumlah peralatan kantor yang dipelihara. 2. Jumlah tenaga operator/honoror	#REF!	47 Unit	32.700.000,00	APBD		47 Unit	35.970.000,00
01 09 02 206	Pembinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet/Intranet	Jumlah jaringan/internet/aplikasi/website	#REF!	2 Paket	39.750.000,00	APBD		2 Paket	43.725.000,00
01 09 02 047	penyediaan rumah dinas/jabatan atau gedung kantor sementara	jumlah rumah atau gedung yang disewa	#REF!	3 Unit	66.000.000,00	APBD		3 Unit	72.600.000,00
Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
01 09 05	Kegiatan :	Prosentase Peningkatan Kapasitas ASN dalam satu Tahun	Dalam dan Luar		74.400.000,00				81.840.000,00
01 09 05 157	Peningkatan Kesegaran Jasmani	Jumlah jasa Pengisi acara struktur senam	Kec. Bandar Laksamana	1 orang	4.400.000,00	APBD		1 orang	4.840.000,00
01 09 05 110	Bimbingan Teknis, Workshop Seminar dan Diklat	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/workshop, seminar dan diklat	Kec. Bandar Laksamana	1 tahun	70.000.000,00	APBD		1 tahun	77.000.000,00
Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
01 09 06	Kegiatan :	Prosentase Peningkatan Kapasitas ASN dalam satu Tahun	Bandar Laksamana		68.900.000,00				75.790.000,00
01 09 06 027	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program dan Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan pengeluaran keuangan	Kec. Bandar Laksamana	6 Jenis dokumen	68.900.000,00	APBD		6 Jenis dokumen	75.790.000,00
Program : Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan									
01 09 30	Kegiatan :				1.632.431.500,00				1.702.434.040,00
01 09 30 004	Penyelenggaraan Operasi Pekat	Jumlah pemantauan terhadap operasi pekat yang dilaksanakan	Kec. Bandar Laksamana	6 Kali	7.350.000,00	APBD		6 Kali	8.085.000,00
01 09 30 005	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah perwakilan unsur kelompok masyarakat yang menghadiri musrenbang Kecamatan	Kec. Bandar Laksamana	6 Unsur Kelompok dan 7 Desa	23.175.000,00	APBD		6 Unsur Kelompok dan 7 Desa	25.492.500,00

-1		-2		-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	
01	09	30	010	Pengiriman Peserta MTQ	Jumlah kafilah, official dan peserta pawai dalam mengikuti MTQ tingkat kabupaten	Kec. Bandar Laksamana	416 Orang	263.300.000,00	APBD		416 Orang	289.630.000,00	
01	09	30	014	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah desa yang berprestasi	Kec. Bandar Laksamana	7 Desa	22.865.000,00	APBD		7 Desa	25.151.500,00	
01	09	30	022	Pemantauan dan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1. Jumlah desa siaga dan dilakukan pencegahan dan penanggulangan, 2. Jumlah personil yang siaga	Kec. Bandar Laksamana	6 Desa, 10 Orang	17.250.000,00	APBD		6 Desa, 10 Orang	18.975.000,00	
01	09	30	023	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Islam dan Keagamaan	Jumlah kegiatan hari besar dan keagamaan yang diselenggarakan	Kec. Bandar Laksamana	1 Tahun	38.150.000,00	APBD		1 Tahun	65.000.000,00	
01	09	30	050	Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan APBDesa	Jumlah pemantauan dan pembinaan yang dilakukan	Kec. Bandar Laksamana	57 Kali	14.883.000,00	APBD		57 Kali	16.371.300,00	
01	09	30	090	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase penyelenggaraan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah	Kec. Bandar Laksamana	100%	196.101.000,00	APBD		100%	215.711.100,00	
01	09	30	104	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1. Jumlah pelayanan yang dilayani, 2. Jumlah petugas PATEN	Kec. Bandar Laksamana	9 jenis, 10 orang	122.779.500,00	APBD		9 jenis, 10 orang	135.057.450,00	
01	09	30	123	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah hari besar nasional/daerah yang diselenggarakan	Kec. Bandar Laksamana	1 Kegiatan	290.943.000,00	APBD		1 Kegiatan	320.037.300,00	
01	09	30	135	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Qur'an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	Jumlah cabang yang dipertandingkan	Kec. Bandar Laksamana	15 Cabang Lomba	381.735.000,00	APBD		15 Cabang Lomba	419.908.500,00	
01	09	30	149	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM	Jumlah Penduduk yang dilayani	Kec. Bandar Laksamana	7 Desa	53.900.000,00	APBD		7 Desa	59.290.000,00	
01	09	30	034	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bandar Laksamana	Jumlah TP-PPK Desa/ Kelurahan yang aktif	Kec. Bandar Laksamana	10 Kelompok	200.000.000,00	APBD		10 Kelompok	103.724.390,00	
								13.216.421.750,00				14.444.823.315,00	
JUMLAH BELANJA LANGSUNG									16.791.727.949,00				28.889.646.630,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG + JUMLAH BELANJA LANGSUNG													

Tenggayun, 2019
CAMAT BANDAR-LAKSAMANA

